

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**TRIWULAN 4
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TRIWULAN 4
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Makassar
Pada hari Rabu, 10 Januari 2024

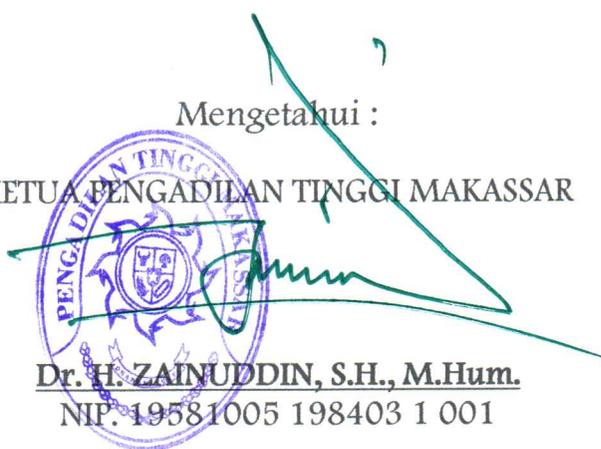
KETUA TIM SURVEI



MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H.
NIP. 19631025 199212 1 001

Mengetahui :

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Makassar yang diambil dengan kuesioner secara daring dan dapat diakses di mana saja menggunakan aplikasi SISUPER yang disediakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

Makassar, 10 Januari 2024

Ketua Tim Survei,



MUHAMMAD DAMIS, S.H, M.H.

NIP. 19631025 199212 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar	19
BAB IV PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan.....	24
4.2. Rekomendasi	26
4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan	27
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	7
2. Nilai Persepsi	7
3. Responden Berdasarkan Umur / Usia	8
4. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	9
5. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	10
6. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	11
7. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
8. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
9. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	14
10. Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya.....	14
11. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan.....	15
12. Indeks Pada Indikator Hadiah	16
13. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	16
14. Indeks Pada Indikator Percaloan	17
15. Indeks Pada indikator Perbuatan Curang.....	18
16. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	18
17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	19
18. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	20
19. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada Survei Triwulan 3/2023 ...	24
20. Rencana Tidak Lanjut Perbaikan	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Makassar merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjadi satuan kerja menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi SISUPER
 - b. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden melalui link aplikasi SISUPER.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Morgan and Krejcie*, yaitu jumlah sampel responden ditentukan dari jumlah populasi survei harian selama 3 bulan terakhir. Lalu sampel responden diarahkan untuk mengakses kuesioner digital melalui website Pengadilan Tinggi Makassar yang terkoneksi ke aplikasi SISUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Link aplikasi SISUPER diberikan kepada daftar pelanggan (pengguna) tetap layanan Pengadilan, dan juga kepada pencari keadilan yang menggunakan layanan pengadilan dalam waktu tertentu. Berikut *Customer Base* (daftar layanan) Pengadilan Tinggi Makassar :

No.	Jenis Layanan
A	KEPANITERAAN
	1. Pengaduan
	2. Pemberian Informasi
	3. Permohonan Banding
	4. Pembinaan dan Pengawasan

	5. Ijin Penelitian
	6. Advokat/Permohonan Sumpah
	7. Perpanjangan Penahanan
	KESEKRETARIATAN
B	1. Pengaduan
	2. Permohonan Informasi
	3. Pembinaan dan Pengawasan

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Makassar.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara daring. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data diunggah oleh petugas pelaksana dari aplikasi SISUPER.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan

skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Umur / Usia

Responden menurut karakteristik umur/usia, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Responden Berdasarkan Umur/ Usia

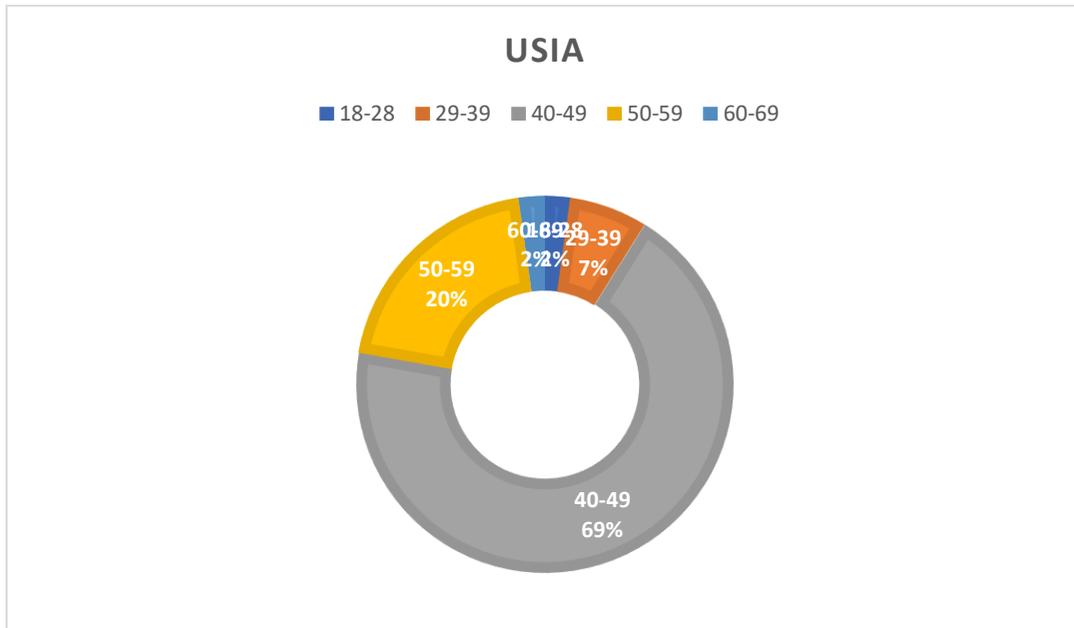
No	Umur / Usia	Frekuensi	%
1	18-28	1	2.22
2	29-39	3	6.67
3	40-49	31	68.89
4	50-59	9	20
5	60-69	1	2.22
Jumlah		45	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 45 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden dengan rentan usia 40-49 tahun sebanyak 31 orang (68.89%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan rentan usia 18-28 dan 60-69 masing-masing sebanyak 1 orang (2.22%).

Karakteristik Rentan usia/umur dari 45 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2
Responden Berdasarkan Umur / Usia



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.2. Jenis Kelamin

Responden menurut karakteristik jenis kelamin, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

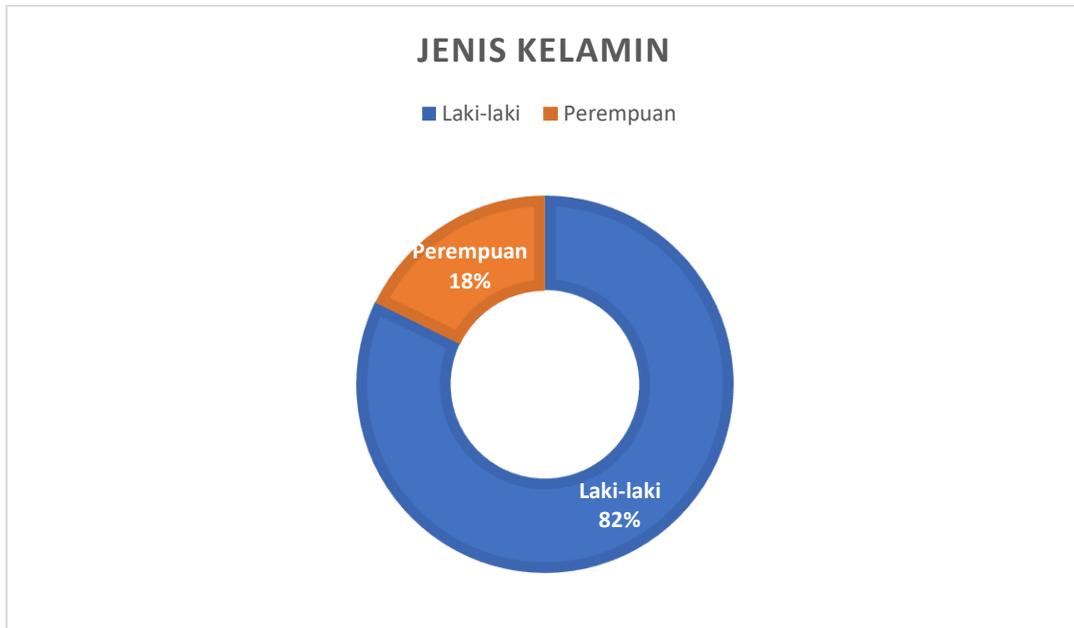
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	37	82.22
2	Perempuan	8	17.78
Jumlah		45	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Kelamin di atas bahwa dari total 45 responden, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang (82.22%) dan perempuan sebanyak 8 orang (17.78%).

Karakteristik Jenis kelamin dari 45 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.3. Pendidikan Terakhir

Responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

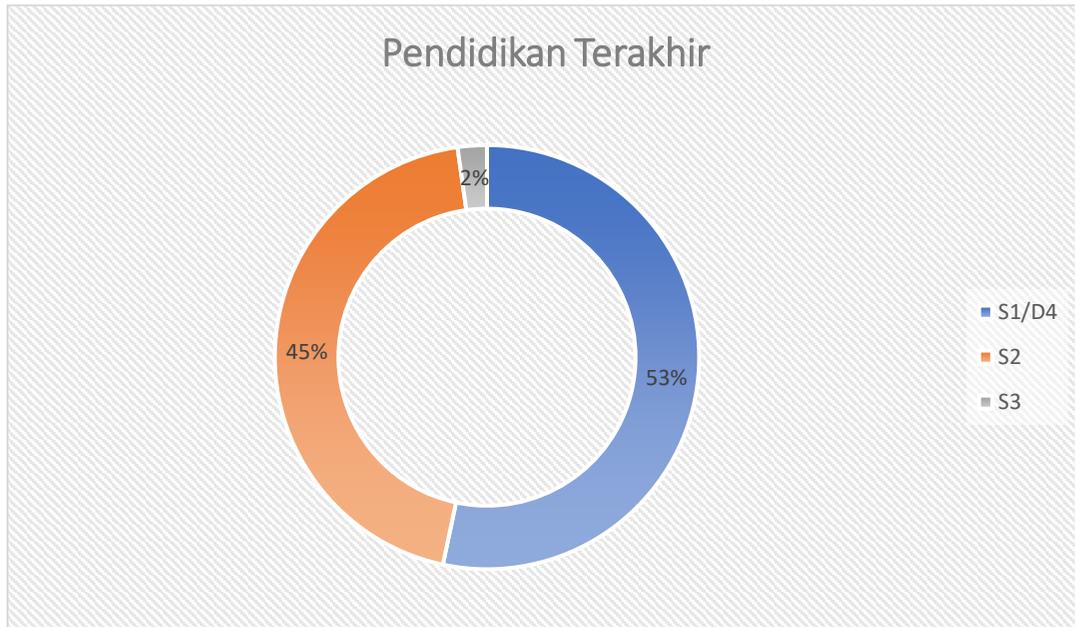
No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	0	0
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	0	0
8	S1 / D4	24	53.34
9	S2	20	44.44
10	S3	1	2.22
Jumlah		45	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dari keseluruhan responden pada survei ini, adalah responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1/D4) sebanyak 24 orang (53.34%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan Pendidikan Terakhir S3 sebanyak 1 orang (2.22%).

Karakteristik Pendidikan Terakhir dari 45 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.4. Pekerjaan Utama

Responden menurut karakteristik latar belakang pekerjaan, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	ASN / PNS	42	93.33
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	Swasta	0	0
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Masyarakat Lainnya selaku Pencari Keadilan	3	6.67
Jumlah		45	100

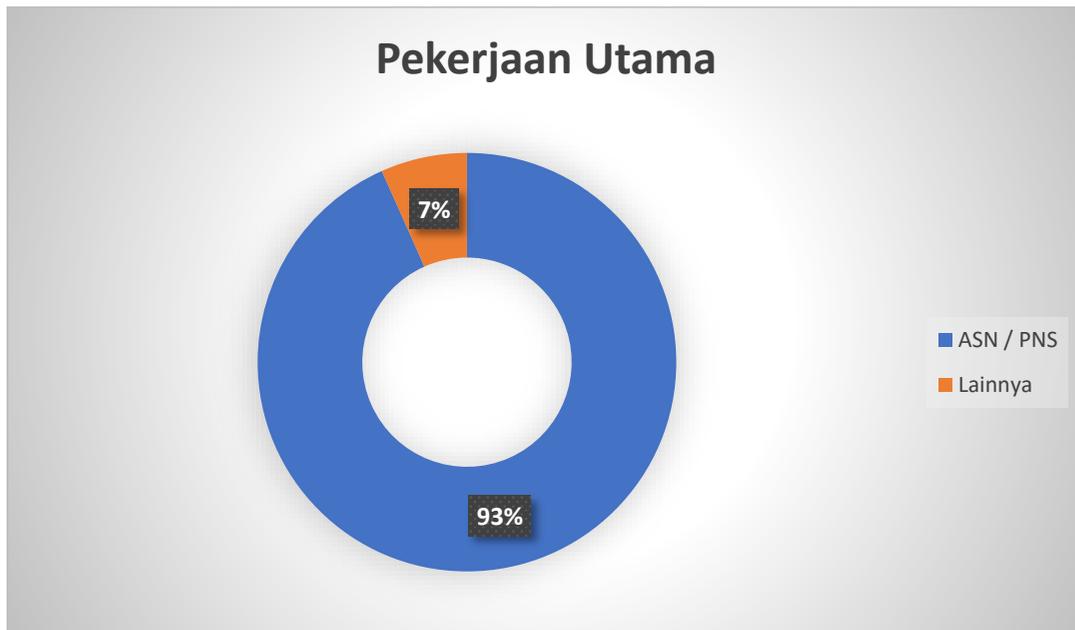
Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama di atas bahwa dari total 45 responden, mayoritas responden pada survei ini berprofesi ASN/PNS yakni sebanyak 42 orang (93.33%), dan kategori responden

paling sedikit adalah Masyarakat Lainnya yakni sebanyak 3 orang (6.67%).

Karakteristik Pekerjaan Utama dari 45 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval index 3,956.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			F	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,956

2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	4.44%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	43	172	95.56%
Jumlah			45	178	100%

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4,000
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	45	180	100%	
Jumlah			45	180	100%	

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4,000
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	45	180	100%	
Jumlah			45	180	100%	

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,978.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Transaksi Biaya di luar dari yang telah ditetapkan secara resmi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator transaksi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	

1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,978
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	2.22%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	44	176	97.78%	
Jumlah			45	179	100%	

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari korupsi melalui Biaya Tambahan.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4,000
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	45	180	100%	
Jumlah			45	180	100%	

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,800.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari pemberian/menjanjikan hadiah.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	3	3	6.67%	3,800
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	42	168	93.33%	
Jumlah			45	171	100%	

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,933.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari ketidaktransparansi biaya.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	2.22%	3,933
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	44	176	97.78%	
Jumlah			45	177	100%	

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari praktik percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4,000
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	45	180	100%	
Jumlah			45	180	100%	

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,978.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,978
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	2.22%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	44	176	97.78%	
Jumlah			45	179	100%	

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bebas dari transaksi rahasia.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

	Kinerja	Frekuensi	
--	---------	-----------	--

Nilai Persepsi	Nilai Interval		f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	Indeks/ Nilai Rata-Rata
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4,000
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	45	180	100%	
Jumlah			45	180	100%	

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar sebesar **3,96** atau **99,11%**.

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dimaksud seperti tertuang pada table berikut :

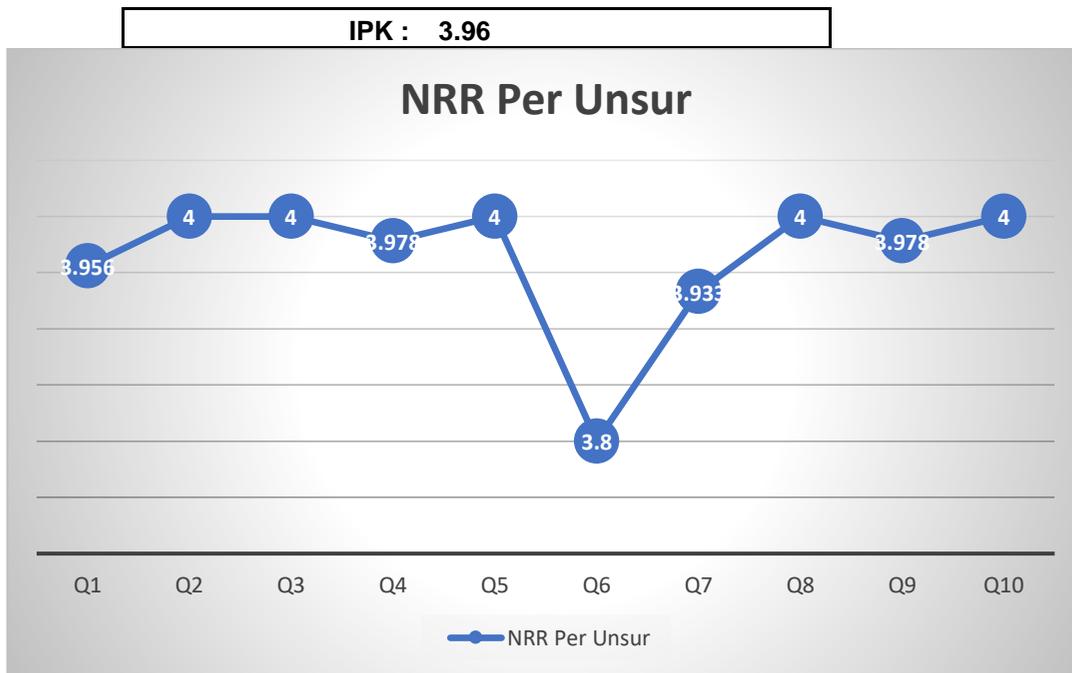
Tabel 17.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	3.956
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4
Q 3	Menjual Pengaruh	4
Q 4	Transaksi Biaya	3.978
Q 5	Biaya Tambahan	4
Q 6	Hadiah	3.800
Q 7	Tranparansi Biaya	3.933
Q 8	Percaloan	4
Q 9	Perbuatan Curang	3.978

Q 10	Transaksi Rahasia	4
JUMLAH		39.644
NILAI RATA-RATA IPK		3,96

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan
NRR : **Nilai Rata-rata**
 IPK : Indeks Persepsi Anti Korupsi
 : **Jumlah NRR IPK**
 *) **Tertimbang**
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi



Gambar 6
 Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Makassar

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 18.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Makassar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi

2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Kesan & Pesan Responden

	Kesan & Pesan
1	Baik
2	Pelayanannya sudah baik.
3	Pelayanan yang memuaskan
4	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR BER INTEGRITAS
5	Pelayanan cepat dan ramah
6	Pelayanan di PT Makassar sangat mantap dan memuaskan
7	Sangat baik
8	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku
9	Kami dilayani sesuai prosedur tanpa meminta imbalan
10	Sangat bagus pelayanannya
11	pelayanan yang baik harus tetap di pertahankan
12	Pelayanan yang baik terus dipertahankan
13	Pelayanan yang diberikan sangat sesuai SOP
14	Pertahankan kinerja pelayanan yang sudah baik
15	Pelayanan sudah baik dan tetap dipertahankan
16	Cepat dlm peleyanan
17	Semoga kedepannya dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memunculkan inovasi-inovasi baru
18	Pelayanan sudah baik dan tetap dipertahankan
19	Terima kasih atas pelayanan Semoga tetap dipertahankan yang terbaik
20	Semoga terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memunculkan inovasi-inovasi baru,
21	Mantap????????
22	Bagus
23	Sangat berintegritas
24	Semoga sehat selalu dan lancar semua pekerjaannya
25	pelayanan prima
26	PT Makassar Mantap
27	pelayanan mantap
28	Pelayanan prima
29	Terima kasih telah memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan
30	sudah cukup
31	Pelayanan sangat memuaskan dan benar2 menjaga integritas
32	pelayanan memuaskan
33	agar dipertahankan yang sudah baik
34	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah cukup baik dan perlu dipertahankan
35	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah cukup baik, semoga kedepannya dapat selalu dipertahankan.
36	Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah cukup baik, semoga selalu dipertahankan
37	Tetap jaga integritas dan semoga pelayanannya bernilai ibadah.
38	lebih baik lagi
39	Pelayanan di Meja PTSP SANGAT MEMUASKAN dan petugasnya sangat ramah..
40	Sudah sangat baik..agar tetap dipertahankan....
41	Pengadilan Tinggi Makassar mantap untuk mewujudkan WBBM dan WBK
42	Pelayanan Pengadilan Tinggi Makassar yang sangat baik
43	Pelayanan PTSP PT Makassar semakin baik, Mantap PT Makassar
44	Semoga pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan lebih baik lagi.

45	Semoga pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan lebih baik lagi.
----	--

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96** atau **99,11%** masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel 19
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada survei Triwulan 4 tahun 2023

No	Unsur Penilaian	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang	Peringkat	Nilai IPK	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3.956	0.396	8		A (Bersih dari Korupsi)
2	Penyalahgunaan Jabatan	4	0.400	1		
3	Menjual Pengaruh	4	0.400	2		
4	Transaksi Biaya	3.978	0.398	7		
5	Biaya Tambahan	4	0.400	3		
6	Hadiah	3.800	0.380	10		
7	Transparansi Biaya	3.933	0.393	9		
8	Percaloan	4	0.400	4		
9	Perbuatan Curang	3.978	0.398	6		
10	Transaksi Rahasia	4	0.400	5		
Jumlah		39.644	3.964		99.11	

Dari tabel 19 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor terendah, yaitu :

1. Hadiah (peringkat ke-10)
Bentuk Pertanyaan : Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
2. Transparansi Biaya (peringkat ke-9)
Bentuk Pertanyaan : Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN)
3. Manipulasi Peraturan (peringkat ke-8)
Bentuk Pertanyaan : Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Dari tabel 19 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor tertinggi, yaitu :

1. Penyalahgunaan Jabatan (peringkat ke-1)

Bentuk Pertanyaan : Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

2. Menjual Pengaruh (peringkat ke-2)

Bentuk Pertanyaan : Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

3. Biaya Tambahan (peringkat ke-3)

Bentuk Pertanyaan : Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ?

Untuk selengkapnya tabulasi perhitungan survei terdapat dalam lampiran 2.

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TRIWULAN 3 TAHUN 2023

NILAI IPK

3,98

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

RESPONDEN

JUMLAH : 45 Orang

PEKERJAAN : PNS = 42 Orang

TNI = 0 Orang

POLRI = 0 Orang

Swasta = 0 Orang

Wirausaha = 0 Orang

Tenaga Kontrak = 0 Orang

Lainnya = 3 Orang

Periode Survei yaitu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,260 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Hadiah** memiliki indeks paling rendah di antara indikator lainnya yaitu 3,800 dan tergolong dalam indikator kinerja bersih dari korupsi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator Hasil Analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan kami prioritaskan dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya dengan jangka pendek kurang dari 3 bulan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 20
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu	Penanggung-jawab
1.	Hadiah	<ul style="list-style-type: none">Tetap memutar Audio Public Campaign di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar	Setiap hari kerja, diputar setiap 2 jam.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.
2.	Transparansi Biaya	<ul style="list-style-type: none">Tetap memutar Audio Public Campaign di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar	Setiap hari kerja, diputar setiap 2 jam.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.
3.	Manipulasi Peraturan	<ul style="list-style-type: none">Mengupdate informasi pada seluruh media informasi yang dimiliki PT Makassar.	Setiap bulan dimonitoring secara berkala.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Kuesioner.
2. Data Responden.

Lampiran 1 : Kuesioner

Dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi Makassar
esurvey.pt-makassar.go.id

Lampiran 2 : Data Responden

**PENGELOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Data Responden Yang Diunduh dari Aplikasi SISUPER
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI :

	Domisili	Umur / Jenis Kelamin	Pendidikan / Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	SULAWESI SELATAN	28 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	SULAWESI SELATAN	35 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	SULAWESI SELATAN	48 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	SULAWESI SELATAN	54 Tahun Laki-laki	S2PNS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	SULAWESI SELATAN	49 Tahun Perempuan	S2LAINNYA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

18	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
21	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	SULAWESI SELATAN	54 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	SULAWESI SELATAN	37 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
24	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	SULAWESI SELATAN	39 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
31	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	SULAWESI SELATAN	51 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	SULAWESI SELATAN	49 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	SULAWESI SELATAN	49 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	SULAWESI SELATAN	49 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
38	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
39	SULAWESI SELATAN	60 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
43	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	SULAWESI SELATAN	44 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

45	SULAWESI SELATAN	44 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
----	---------------------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---